

**DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH  
DALAM KONTEKS PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI PADA KABUPATEN MUSI RAWAS DAN MUSI RAWAS UTARA)**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Sains (M.Si)  
Pada  
Program Studi Magister Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

**ADI HAYU PRASETIYO  
NIM 07012682327030**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Konteks Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara)

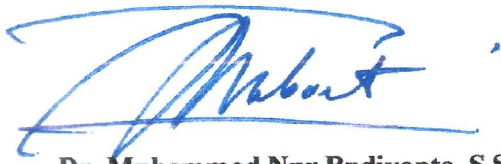
Nama Mahasiswa : Adi Hayu Prasetyo

NIM : 07012682327030

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik

### Menyetujui,



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.  
Pembimbing Pertama



Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP.  
Pembimbing Kedua

### Mengetahui,

Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si  
NIP 19780512 200212 1 003



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP 19660122 199003 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Konteks  
Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten  
Musi Rawas dan Musi Rawas Utara)

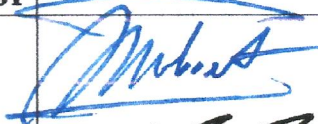
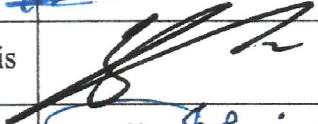




Nama Mahasiswa : Adi Hayu Prasetyo

NIM : 07012682327030

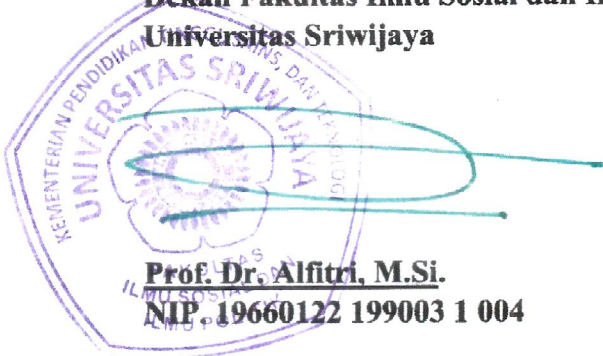
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik


Tanggal Ujian : 8 Januari 2025

NO	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.	Ketua	
2	Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Wahyuningrat, M.Si	Anggota	
4	Prof. Dr. Sriati, M.S.	Anggota	
5	Dr. Ir. Abdul Nadjib, M.M.	Anggota	
6	Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si	Anggota	

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Palembang, Januari 2025**  
**Menyetujui,**  
**Koordinator Program Studi**  
**Magister Administrasi Publik**

  
**Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si**  
**NIP 19780512 200212 1 003**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Hayu Prasetyo  
NIM : 07012682327030  
Tempat/Tanggal Lahir : Subulussalam, 17 Agustus 1990  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Konteks Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Januari 2025  
Yang Menyatakan,



Adi Hayu Prasetyo  
NIM. 07012682327030

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Hayu Prasetyo  
NIM : 07012682327030  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DALAM KONTEKS  
PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN MUSI RAWAS  
DAN MUSI RAWAS UTARA)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang  
Pada Tanggal : Januari 2025  
Yang Menyatakan,



Adi Hayu Prasetyo  
NIM. 07012682327030

## ABSTRAK

### DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DALAM KONTEKS PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN MUSI RAWAS DAN MUSI RAWAS UTARA)

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis, Januari 2025

Adi Hayu Prasetyo; dibimbing oleh Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. dan Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP.

xxii + 149 halaman, 31 tabel, 10 grafik, 8 gambar

Salah satu tujuan pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun dua tahun (2015) sejak pemekaran pada tahun 2013, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan sebagai daerah tertinggal di Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa tujuan pemekaran belum tercapai. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak atas pemekaran wilayah yang telah berlalu lebih dari 10 tahun pada Kabupaten Musi Rawas (daerah induk) dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Daerah Otonomi Baru/DOB) dengan dimensi evaluasi dampak fokus pada selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan (Langbein, 1980), melalui parameter pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Metode evaluasi kebijakan yang digunakan yaitu *comparative before – after* menurut Finsterbusch dan Motz (1980). Kemudian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kualitatif, observasi, dan pengumpulan dokumen serta catatan arsip. Penelitian dianalisis dengan lima tahap analisis yang disampaikan Robert K. Yin, yaitu *Compile Database, Disassemble Data, Reassemble Data, Interpret Data, & Conclude*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah pada daerah induk dan DOB tersebut memiliki dampak aktual yang bersifat positif sesuai dengan yang diharapkan melalui parameter pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat, namun terdapat pula dampak yang tidak diharapkan dan bersifat negatif. Dampak positif yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah belum sebanding dengan beban pada APBN untuk proses pemekaran dan dana transfer tiap tahun kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya strategi dari pemerintah Mura dan Muratara untuk meningkatkan dan mengawasi pemberdayaan masyarakat dan komoditas unggulan daerah, infrastruktur, dan PAD, serta pemerataan guru dan nakes.

Kata Kunci : Dampak, Pemekaran, Ekonomi, Keuangan, Kesejahteraan

Pembimbing I

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.

Pembimbing II

Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP.

Mengetahui Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si  
NIP 19780512 200212 1 003

## ABSTRACT

### *THE IMPACT OF REGIONAL EXPANSION IN THE CONTEXT OF LOCAL GOVERNMENT (A STUDY OF MUSI RAWAS AND NORTH MUSI RAWAS DISTRICTS)*

*Scientific Paper in the form of Thesis, January 2025*

*Adi Hayu Prasetyo; supervised by Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. and Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP.*

*xxii + 149 pages, 31 tables, 10 graphs, 8 figures*

*One of the objectives of regional expansion is to improve the welfare of the community, but two years (2015) since the expansion in 2013, Musi Rawas Regency and North Musi Rawas Regency were designated as underdeveloped regions in South Sumatra, which shows that the purpose of expansion has not been achieved. This study aims to analyse the impact of regional expansion that has passed more than 10 years in Musi Rawas Regency (parent region) and North Musi Rawas Regency (New Autonomous Region/DOB) with the impact evaluation dimension focusing on the difference between actual and expected impacts (Langbein, 1980), through the parameters of economic growth, regional financial performance, and community welfare. The policy evaluation method used is comparative before - after according to Finsterbusch and Motz (1980). Then, the research approach used was qualitative with data collection techniques through qualitative interviews, observation, and collection of documents and archival records. The research was analysed using Robert K. Yin's five stages of analysis, namely Compile Database, Disassemble Data, Reassemble Data, Interpret Data, & Conclude. The results showed that regional expansion in the parent regions and DOBs had actual impacts that were positive in nature as expected through the parameters of economic growth, regional financial performance, and community welfare, but there were also unexpected and negative impacts. The positive impacts received by the community and local governments have not been proportional to the burden on the state budget for the expansion process and the transfer of funds each year to local governments. The results of this study indicate the need for strategies from the Mura and Muratara governments to improve and oversee community empowerment and regional superior commodities, infrastructure, and PAD, as well as equal distribution of teachers and health workers.*

*Keywords: Impact, Expansion, Economy, Finance, Welfare*

*Advisor I*



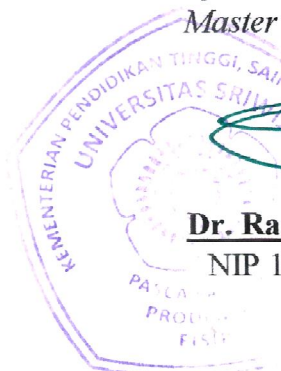

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.**

*Advisor II*



**Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP.**

*Knowing The Programme Study Coordinator  
Master of Public Administration*



**Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si**  
NIP 19780512 200212 1 003

## RINGKASAN

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menggantikan UU Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi dasar kebijakan pemekaran wilayah. Pemekaran daerah di Provinsi Sumatera Selatan telah menghasilkan 10 Daerah Otonomi Baru (DOB) antara tahun 2001 hingga 2013, dengan pemekaran terakhir adalah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013 berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013. Salah satu tujuan pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dua tahun sejak pemekaran, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara justru ditetapkan sebagai daerah tertinggal di Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa tujuan pemekaran belum tercapai.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak atas pemekaran wilayah yang telah berlalu lebih dari 10 tahun pada Kabupaten Musi Rawas (daerah induk) dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Daerah Otonomi Baru/DOB) dengan dimensi evaluasi dampak fokus pada selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan (Langbein, 1980), melalui parameter pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Metode evaluasi kebijakan yang digunakan yaitu *comparative before – after* menurut Finsterbusch dan Motz (1980). Kemudian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kualitatif, observasi pengamat penuh, dan pengumpulan dokumen serta catatan arsip. Penelitian dianalisis dengan lima tahap analisis yang disampaikan Robert K. Yin, yaitu *Compile Database, Disassemble Data, Reassemble Data, Interpret Data, & Conclude*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah pada daerah induk dan DOB tersebut memiliki dampak aktual sesuai dengan yang diharapkan dan bersifat positif namun terdapat pula dampak yang tidak diharapkan dan bersifat negatif. Dampak positif dan negatif tersebut dianalisis melalui parameter pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Temuan selain dari tiga parameter tersebut yaitu parameter pelayanan publik, pemerintah daerah menjadi lebih dekat dan lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jarak yang lebih terjangkau dan jumlah



kecamatan/desa dan penduduk untuk dilayani berkurang sehingga antrian untuk beberapa prioritas layanan menjadi lebih singkat. Namun, dampak positif yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah belum sebanding dengan beban pada APBN untuk proses pemekaran dan dana transfer tiap tahun kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya strategi dari pemerintah Mura dan Muratara untuk meningkatkan dan mengawasi pemberdayaan masyarakat dan komoditas unggulan daerah, infrastruktur dan sarana prasarana penunjang, PAD, dan pemerataan guru serta nakes. Pemerintah Pusat juga perlu melakukan evaluasi keberlanjutan moratorium dan Pemda yang mengusulkan untuk pemekaran agar memberikan informasi yang komprehensif berupa dampak positif dan negatif serta bertujuan untuk mandiri dalam keuangan daerah.

Kata Kunci: Dampak, Pemekaran Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja Keuangan, Kesejahteraan Masyarakat

Kepustakaan:

## SUMMARY

*Law No. 23 of 2014 on Regional Government, replacing Law No. 32 of 2004, is the basis for regional expansion policy. Regional expansion in South Sumatra Province has resulted in 10 New Autonomous Regions (DOB) between 2001 and 2013, with the last expansion being North Musi Rawas Regency in 2013 based on Law Number 16 of 2013 dated 10 July 2013. One of the objectives of regional expansion is to improve the welfare of the community, but two years after the expansion, Musi Rawas Regency and North Musi Rawas Regency were actually designated as underdeveloped regions in South Sumatra, which shows that the purpose of expansion has not been achieved.*

*This study aims to analyse the impact of regional expansion that has passed more than 10 years in Musi Rawas Regency (parent region) and North Musi Rawas Regency (New Autonomous Region/DOB) with the impact evaluation dimension focusing on the difference between actual and expected impacts (Langbein, 1980), through the parameters of economic growth, regional financial performance, and community welfare. The policy evaluation method used is comparative before - after according to Finsterbusch and Motz (1980). Then, the research approach used was qualitative with data collection techniques through qualitative interviews, full observer observation, and document collection and archival records. The research was analysed using Robert K. Yin's five stages of analysis, namely Compile Database, Disassemble Data, Reassemble Data, Interpret Data, & Conclude.*

*The results showed that regional expansion in the parent region and DOB had actual impacts as expected and were positive but there were also impacts that were not expected and were negative. The positive and negative impacts were analysed through the parameters of economic growth, regional financial performance, and community welfare. The findings apart from these three parameters, namely the public service parameter, local governments are closer and more focused in providing services to the community. The distance is more affordable and the number of sub-districts/villages and residents to be served is reduced so that queues for some service priorities are shorter. However, the positive impacts received by the community and local governments have not been*

*proportional to the burden on the state budget for the expansion process and the annual transfer of funds to local governments. The results of this study indicate the need for strategies from the Mura and Muratara governments to improve and oversee community empowerment and regional superior commodities, supporting infrastructure and facilities, PAD, and equitable distribution of teachers and health workers. The central government also needs to evaluate the sustainability of the moratorium and local governments that propose for expansion to provide comprehensive information in the form of positive and negative impacts and aim to be independent in regional finances.*

*Keywords: Impact, Regional Expansion, Economic Growth, Financial Performance, Community Welfare*

*Literature:*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat iman, islam dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Konteks Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara)**”. Shalawat beserta salam semoga terus tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, beserta keluarga dan para sahabat. Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Magister Sains (S2) pada Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Selama proses penyusunan tesis ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta tetap menuntun peneliti untuk tekun mengerjakan tesis ini dan memberikan kemudahan bagi setiap langkah yang peneliti ambil dari sejak dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si selaku Koordinator Program Studi yang memberikan bimbingan dan masukan selama perkuliahan dan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan tesis hingga akhirnya tesis ini bisa terselesaikan. Terima kasih atas segala bimbingan dan konsultasi yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan,

semangat, dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan tesis hingga akhirnya tesis ini bisa terselesaikan. Terima kasih atas segala masukan guna penyelesaian tesis ini serta semua motivasi dan nasihat yang telah diberikan selama ini.

6. Seluruh penguji dalam seminar proposal, seminar hasil dan sidang tesis, Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM., Prof. Dr. Sriati, M.Si., Dr. M. Husni Thamrin, M.Si., dan Dr. Ir. Abdul Nadjib, M.M., serta Prof. Dr. Wahyuningrat, M.Si selaku dosen penguji tamu, Dekan FISIP Unsoed, yang telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun dalam penyusunan tesis ini.
7. Seluruh anggota kelas Bappenas Dalam Negeri dan Afirmasi Tahun 2023 atas semangat belajar yang serius dan santai selama satu setengah tahun ini.
8. Seluruh informan dalam penelitian ini baik di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, di tingkat Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara, maupun masyarakatnya.
9. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan memberi doa, masukan dan semangat bagi peneliti, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dan diperkenalkan dengan kalian semua, terima kasih banyak.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh*

Palembang, Januari 2025

Adi Hayu Prasetiyo  
NIM 07012682327030

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

QS. Al Baqarah: 286

لَا تَحْزَنُ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا

“Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

QS. At Taubah: 40

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Papa dan mama tercinta. Papa Rusdi dan Mama Suharyati yang sangat saya cintai dan sayangi yang telah memotivasi saya serta mendoakan dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Istriku tercinta, Galuh Shashi Grasia yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya selama ini. Terima kasih banyak karena telah mendampingi dalam suka dan duka, dengan melalui banyak perjuangan dan rasa sakit (terutama saat hamil) demi memberikan dorongan secara materil dan nonmaterial kepada saya hingga saat ini.
3. Anak-anakku tercinta, Shaqeenah Khadijah Naisyaturrahma dan Shareena Aisyah Naisyaturrahmi yang insyaAllah telah menjadi tabungan kami di akhirat kelak.
4. Anak-anakku tercinta, Shafiyah Asy-Syifa dan Syafiq Abdurrahman Alfarizqi, semoga menjadi anak yang sholeh sholehah dan hafidz hafidzoh.

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Adi Hayu Prasetyo, lahir di Subulussalam pada tanggal 17 Agustus 1990. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Rusdi dan Ibu Suharyati. Menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kota Metro pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Kota Metro dan lulus pada tahun 2005, dan melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Kota Metro dan lulus pada tahun 2008. Selanjutnya peneliti melanjutkan Pendidikan DIII dengan spesialisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan lulus pada 2011.

Setelah lulus DIII, peneliti mendapatkan Surat Keputusan untuk bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Maret tahun 2012 dan ditempatkan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah pada Desember tahun 2012. Mengikuti program beasiswa STAR-BPKP pada tahun 2015 untuk melanjutkan Pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman sehingga mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada tahun 2017. Setelah lulus S1, re-entry sebelum penempatan kembali di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung hingga akhir 2017. Kemudian ditempatkan di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi di awal tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2023. Peneliti melanjutkan pendidikan S2 pada program studi Magister Administrasi Publik (MAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, dan menyelesaikan studi pada tahun 2025 sehingga memperoleh gelar Magister Sains (M.Si).

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
RINGKASAN .....	viii
<i>SUMMARY</i> .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiv
RIWAYAT HIDUP.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Perumusan Masalah.....	8
1.3    Tujuan Penelitian.....	8
1.4    Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1.    Landasan Teori .....	10
2.1.1.    Desentralisasi.....	10
2.1.2.    Otonomi Daerah.....	15
2.1.3.    Pemekaran Daerah.....	16
2.1.4.    Kesejahteraan Masyarakat .....	20
2.1.5.    Desentralisasi Fiskal .....	21
2.1.6.    Pertumbuhan Ekonomi .....	23



2.1.7.	Kinerja Keuangan Daerah.....	26
2.1.8.	Daerah Tertinggal .....	29
2.1.9.	Evaluasi Kebijakan Daerah.....	30
2.1.10.	Metode Evaluasi yang Digunakan .....	34
2.2.	Penelitian Terdahulu.....	35
2.3.	Kerangka Pemikiran .....	43
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1.	Desain Penelitian .....	45
3.2.	Jenis Penelitian .....	45
3.3.	Fokus Penelitian .....	46
3.4.	Unit Analisis .....	47
3.5.	Sumber Data .....	48
3.6.	Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.7.	Informan Penelitian .....	55
3.8.	Teknik Keabsahan Data.....	57
3.9.	Teknik Analisis Data .....	58
3.10.	Novelty Metode Penelitian .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
4.1.	Kabupaten Musi Rawas.....	61
4.2.	Kabupaten Musi Rawas Utara .....	64
<b>BAB V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
5.1.	Hasil Penelitian.....	71
5.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi .....	71
5.1.2.	Kinerja Keuangan Daerah.....	92
5.1.3.	Kesejahteraan Masyarakat .....	105
5.2.	Pembahasan .....	119
5.1.1.	Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	119
5.1.2.	Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	127
5.1.3.	Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	132

5.1.4. Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pelayanan Publik.....	135
BAB VI PENUTUP .....	141
6.1. Kesimpulan.....	141
6.2. Saran .....	142
DAFTAR PUSTAKA .....	144
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Tiga Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	14
Tabel 2.2 Status Indeks Pembangunan Manusia.....	21
Tabel 2.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah .....	27
Tabel 2.4 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah .....	28
Tabel 2.5 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah .....	28
Tabel 2.6 Sebaran Daerah Tertinggal Berdasarkan Wilayah di Indonesia .....	30
Tabel 2.7 Metode Evaluasi Finsterbusch dan Motz .....	32
Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 3.1 Desain Penelitian.....	45
Tabel 3.2 Fokus Penelitian.....	47
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	56
Tabel 5.1 PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (miliar rupiah) 2010-2023 pada Mura dan Muratara .....	73
Tabel 5.2 Produksi Komoditas Pertanian di Mura dan Muratara (dalam Ton).....	75
Tabel 5.3 Produksi Kelapa, Kopi, dan Kakao di Mura dan Muratara (dalam Ton) .....	77
Tabel 5.4 Target dan Capaian terkait PDRB Sektor Pertanian pada Mura dan Muratara.....	78
Tabel 5.5 PDRB per Kapita Tahun 2011-2023 pada Mura dan Muratara .....	80
Tabel 5.6 Data Jalan Mantap di Mura dan Muratara .....	83
Tabel 5.7 Data Jalan Berdasarkan Perkerasan di Mura.....	83
Tabel 5.8 Data Jalan Berdasarkan Perkerasan di Muratara.....	84
Tabel 5.9 Target dan Capaian Indikator Jalan Mantap dan Konektivitas antar Wilayah pada Mura dan Muratara .....	85
Tabel 5.10 Target dan Capaian Indikator Terkait Kelistrikan pada Mura dan Muratara .....	87
Tabel 5.11 PAD dan Rasio Kemandirian Daerah di Mura dan Muratara .....	93
Tabel 5.12 Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Mura dan Muratara tahun 2021-2023.....	95
Tabel 5.13 Kinerja Keuangan Daerah Lainnya di Mura dan Muratara .....	97

Tabel 5.14 Target dan Capaian Opini LKPD dan IPKD pada Mura dan Muratara .....	101
Tabel 5.15 Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2015-2021 di Mura dan Muratara .....	108
Tabel 5.16 Target dan Capaian Indikator Pendidikan pada Mura dan Muratara .....	110
Tabel 5.17 Puskesmas di Mura dan Muratara .....	113
Tabel 5.18 Data Kekurangan Nakes Berdasarkan Faskes di Mura dan Muratara .....	114
Tabel 5.19 Target dan Capaian Indikator Kesehatan pada Mura dan Muratara .	117
Tabel 5.20 Matrik Temuan Hasil Penelitian .....	137

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2023.....	5
Grafik 5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Mura dan Muratara tahun 2011-2023.....	74
Grafik 5.2 Luas Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit (Ha) di Mura dan Muratara.....	76
Grafik 5.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Mura dan Muratara tahun 2011-2023....	79
Grafik 5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Mura dan Muratara.....	81
Grafik 5.5 Jumlah Desa Belum Berlistrik di Sumatera Selatan .....	89
Grafik 5.6 Tren PAD dan DBH SDA di Mura dan Muratara .....	93
Grafik 5.7 Jumlah Sekolah Mura dan Muratara tahun 2014 & 2023.....	106
Grafik 5.8 Tren Rata-rata dan Harapan Lama Sekolah di Mura dan Muratara...	109
Grafik 5.9 Tren Umur Harapan Hidup (UHH) di Mura dan Muratara .....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lima Tahap Analisis Data Robert K. Yin (2016) .....	58
Gambar 5.1 Trafo yang Dibakar pada Tempat Rencana Pembangunan Gardu Induk Rupit .....	91
Gambar 5.2 Badan Pendapatan Daerah Sewa Ruko (1) dan Disdukcapil Sewa Rumah Warga (2) di Muratara .....	99
Gambar 5.3 RSUD Rupit di Rupit .....	100
Gambar 5.4 RSUD dr. Sobirin di Muara Beliti.....	100
Gambar 5.5 Rumah Dinas Bupati yang Masih Dalam Proses Pengerjaan di Muara Beliti .....	101
Gambar 5.6 Aplikasi layanan perpajakan di Mura dan Muratara .....	103
Gambar 5.7 Puskesmas Rupit dengan <i>Ambulance</i> yang <i>Standby</i> .....	112

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemekaran daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan sebanyak 10 Daerah Otonomi Baru (DOB) berupa tujuh kabupaten dan tiga kota sejak tahun 2001 hingga tahun 2013. Pemekaran daerah yang terakhir dilakukan yaitu pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara dari Kabupaten Musi Rawas melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013. Pemekaran daerah tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dasar teknis pemekaran dua kabupaten tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Sedangkan aturan pelaksanaan pemekaran daerah atas UU Nomor 23 Tahun 2014 belum ditetapkan hingga saat ini.

Pemekaran daerah merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melalui (i) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (ii) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (iii) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (iv) percepatan pengelolaan potensi daerah; (v) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan (vi) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah). Tujuan dari pemekaran daerah adalah untuk mendekatkan rentang kendali pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebutlah yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara untuk dapat “berpisah” dari kabupaten induk. Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara merasa terpinggirkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dengan kurangnya fasilitas dasar seperti listrik dan rumah sakit. Tahapan yang harus dilalui untuk pemekaran juga membutuhkan waktu yang cukup lama, dimuai

pada tahun 2004 yang menjadi langkah awal masyarakat untuk mewujudkan tekad mereka melalui pembentukan Presidium Persiapan Kabupaten (PPK) Musi Rawas Utara hingga tahun 2013 terjadi penutupan jalan lintas Sumatera yang berujung bentrok dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan belasan luka-luka.

Namun, alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik pada DOB maupun daerah induk yang baru pemekaran selama dua tahun, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 sebagai dua daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019. Adanya penetapan tersebut, mengisyaratkan bahwa tujuan dari pemekaran daerah untuk dua kabupaten tersebut belum tercapai.

Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 kecamatan dan 186 desa, sebanyak enam desa tahun 2020 dan satu desa tahun 2021 ditetapkan sebagai desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Desa tertinggal tersebut terletak pada Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kecamatan Muara Kelingi, dan Kecamatan Muara Lakitan. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 7 kecamatan dan 82 desa dengan sembilan desa ditetapkan sebagai desa tertinggal pada tahun 2020 dan enam desa pada tahun 2021. Desa tertinggal menyebar pada Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Rupit.

Dalam penelitiannya, Canaldhy et al. (2019) mengemukakan permasalahan pada Kabupaten Musi Rawas Utara pasca pemekaran daerah, yaitu ketergantungan pada pertanian sehingga keterbatasan pada diversifikasi ekonomi, kualitas pendidikan SDM rendah, infrastruktur yang kurang memadai, pengembangan pariwisata yang terabaikan, dan keterbatasan keuangan daerah serta masalah keamanan dan sosial seperti pencurian, bentrok antar warga dan penyalahgunaan narkoba. Sementara itu pada Kabupaten Musi Rawas pada awal-awal pemekaran mengalami gangguan dari pergeseran kegiatan ekonomi dan nilai PAD yang didapatkan (Effendi et al, 2005).

Pada periode penetapan daerah tertinggal berikutnya tahun 2020-2024, melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, Kabupaten Musi Rawas Utara



masih masuk dalam kelompok daerah tertinggal. Tujuh tahun sejak ditetapkannya Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai DOB, masih belum memberikan hasil yang diharapkan. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas sudah menjadi daerah yang terentaskan dari daerah tertinggal.

Salah satu indikator yang mempengaruhi pemekaran wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Mulkan & Aprita (2023), tanpa perekonomian yang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan. Sementara dengan pendapatan yang memadai, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun, dan diukur dari PDRB atas dasar harga konstan (BPS, 2024).

Berdasarkan data dari BPS (2024), ada dua sektor lapangan usaha/industri yang memiliki kontribusi tinggi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 5 tahun terakhir pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Persentase distribusi dan nilai PDRB atas harga konstan 2010 pada tahun 2023 di Kabupaten Musi Rawas untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sebesar 29,74% dan 5,18 triliun rupiah dan untuk sektor pertambangan dan penggalian sebesar 29,97% dan 5,56 triliun rupiah. Sedangkan pada Kabupaten Musi Rawas Utara untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sebesar 46,56% dan 4,22 triliun rupiah dan untuk sektor pertambangan dan penggalian sebesar 22,35% dan 2,03 triliun rupiah. Diharapkan bahwa pemerintah daerah akan memfokuskan pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal dan mengalokasikan potensi lokal secara lebih efisien sesuai dengan kebutuhan publik (Lin & Liu, 2000; Mardiasmo, 2002 dan Wong, 2004)).

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Edistian, 2020). Namun, tingginya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak berarti tidak memerlukan pemberdayaan, pembinaan ataupun bantuan dari pemerintah. Petani perorangan sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah terutama untuk perkebunan karena biasanya memerlukan modal yang lebih besar dibandingkan komoditas pertanian

lainnya. Hal lain yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Mura dan Muratara, yaitu infrastruktur jalan yang menghubungkan sawah dan kebun, antar desa, kecamatan, dan kabupaten, serta pasar.

Evaluasi dampak pemekaran daerah yang dilakukan pemerintah melalui kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan UNDP Tahun 2008 terhadap empat aspek yaitu perekonomian daerah, keuangan daerah, pelayanan publik, dan aparatur pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun (2001-2005), menunjukkan kondisi DOB yang tidak lebih baik daripada daerah induk. Dari aspek keuangan daerah, kinerja keuangan DOB cenderung konstan, DOB memiliki ketergantungan fiskal yang lebih tinggi, dan optimalisasi PAD di DOB relatif lebih rendah.

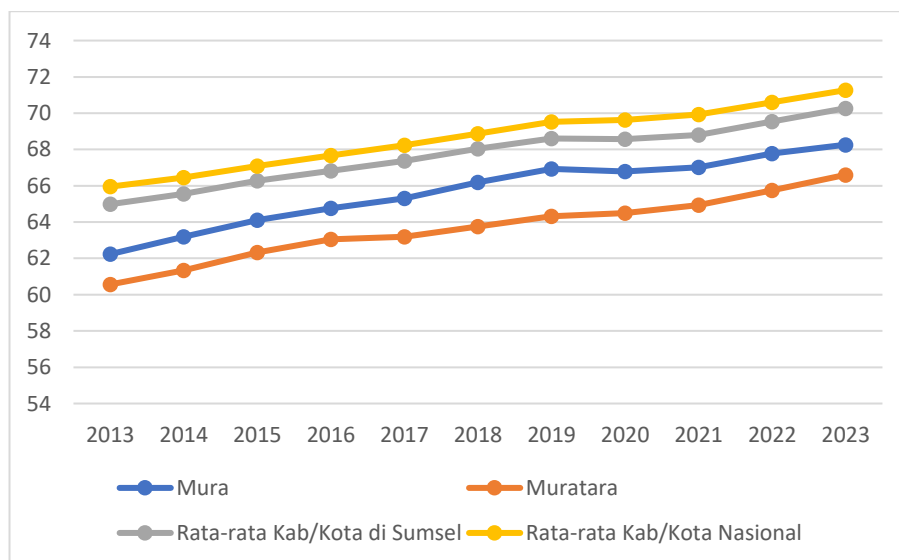
Kinerja keuangan daerah menjadi tolak ukur yang mengindikasikan keberhasilan desentralisasi fiskal pada daerah otonom, khususnya PAD yang menjadi sumber utama pendapatan daerah dibanding sumber lainnya. Menurut Sidik (2002), PAD harus menjadi sumber utama penerimaan selama era otonomi yang ideal. Kondisi ini, salah satunya dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah pada daerah induk dan DOB. Rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Musi Rawas mengalami fluktuatif selama 10 tahun terakhir (2014-2023) dengan rata-rata 8,87%. Rasio tertinggi yaitu 11,95% pada tahun 2014 sedangkan rasio terendah yaitu 6,64% pada tahun 2018. Pada Kabupaten Musi Rawas Utara, rasio kemandirian keuangan daerah juga mengalami fluktuatif selama 10 tahun terakhir dengan rata-rata 5,06%. Rasio tertinggi yaitu 7,93% pada tahun 2017 sedangkan rasio terendah yaitu 3,47% pada tahun 2018. Rasio pada kedua pemerintah daerah tersebut masih dalam kategori “Rendah Sekali” yaitu dalam rentang 0%-25%, sehingga masih cukup jauh untuk bisa mencapai minimal 25% pada rasio kemandirian keuangan daerah.

Menurut Kusmila et al. (2018), kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, banyak DOB yang masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat sehingga peranan pemerintah pusat menjadi lebih dominan dibanding dengan kemampuan daerah dalam kemandirian pengelolaan keuangan daerah. Maulana (2019) juga menyampaikan bahwa pembentukan DOB memberi tekanan terhadap keuangan negara (APBN) karena besarnya dana perimbangan

yang harus ditransfer ke daerah-daerah baru. Hal yang senada juga disampaikan oleh beberapa peneliti, antara lain, Safitri et al. (2020) dan Rustendi (2021).

Dengan PAD yang terbatas, maka pemerintah daerah tidak leluasa mengalokasikan dan menambah belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat, contohnya anggaran pendidikan dan kesehatan. Dalam penelitian Sari et al. (2022) terhadap 34 Provinsi selama lima tahun, anggaran pendidikan dan kesehatan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan cerminan kesejahteraan masyarakat dan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pemekaran daerah. Kesejahteraan masyarakat mengacu pada kondisi di mana masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar, pendidikan, perumahan, pangan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang adil (*United Nations Development Programme/UNDP, 2005*). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yang mencakup umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Perhitungan IPM di Indonesia dilakukan oleh BPS dengan nilai IPM berkisar dari 0 hingga 100. Nilai IPM mendekati 100 menunjukkan pembangunan manusia pada wilayah/daerah tersebut semakin baik. IPM menurut kabupaten/kota selama 10 tahun terakhir disajikan pada grafik berikut:



Grafik 1.1 IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2023

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan grafik diatas, IPM Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, namun kondisi tersebut masih berada dibawah rata-rata IPM menurut kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan bahkan IPM menurut kabupaten/kota secara nasional. Nilai IPM Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2013 yaitu 62,23, mengalami kenaikan sebesar 6,03 hingga memiliki nilai 68,26 pada tahun 2023. IPM Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kenaikan sebesar 6,04 dari tahun 2013 senilai 60,56 menjadi 66,60 pada tahun 2023. Nilai IPM pada kedua pemerintah daerah tersebut masih dalam status IPM “Sedang”, yaitu kisaran nilai 60 hingga 70. Status IPM masuk dalam kategori “Tinggi” jika memiliki nilai pada kisaran 70 hingga 80.

Pendidikan dan kesehatan merupakan poin penting dalam kesejahteraan masyarakat. Fasilitas dan SDM pelayanan juga menjadi krusial bagi masyarakat terutama di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Di tahun 2022 dan 2023 masih ada kejadian bayi meninggal karena terlambat dalam pertolongan menuju Puskesmas atau Rumah Sakit. Kekurangan guru ASN dan kekurangan ruang belajar menjadi salah satu masalah di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Menurut pejabat pada Biro Pemeritahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, secara umum pemekaran daerah di wilayah Sumatera Selatan dapat dikatakan berhasil yang dapat dilihat dari infrastruktur yang dibangun setelah adanya pemekaran dan memberikan pelayanan yang lebih dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya pemekaran Kota Lubuk Linggau dari Kabupaten Musi Rawas di tahun 2001, menyebabkan ibukota Kabupaten Musi Rawas pindah ke Muara Beliti. Begitu pula pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun 2013 dengan ibukota di Rupit. Ada pembangunan dan peningkatan jalan serta infrastruktur lainnya di Muara Beliti, Rupit, dan sekitarnya memudahkan akses bagi masyarakat sehingga ekonomi masyarakat sekitar juga berkembang. Namun disisi lain, pemekaran daerah membutuhkan anggaran besar yang dibebankan pada APBN dan ada juga dari APBD Provinsi (sesuai dengan PP 78 Tahun 2007). Hal tersebut karena belum optimalnya PAD yang diterima pemerintah daerah terutama bagi DOB.

Iskatrinah & Supriyo (2021) dalam penelitian dengan metode hukum normatif, berpendapat bahwa pembentukan daerah melalui pemekaran kabupaten/kota sebenarnya hal yang sulit, namun tren pemekaran terus meningkat, dalam kenyataannya pemekaran daerah tidak dapat menjadi pilihan utama dalam percepatan pembangunan. Namun, disisi lain pembentukan daerah juga bukanlah hal yang harus dihindari. Berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2007, daerah otonom yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya, dapat dihapus dari hasil evaluasi dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Daerah otonom yang dihapus tersebut digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian. Namun hingga saat ini, belum ada penghapusan dan penggabungan yang dilakukan pemerintah, termasuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan pada dua kabupaten yang pada tahun 2015 ditetapkan sebagai dua daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan dan juga merupakan satu daerah yang sama sebelum pemekaran pada tahun 2013, menjadikan dua daerah ini menjadi layak untuk diteliti/dibandingkan perkembangan dampak yang terjadi pasca pemekaran. Kabupaten Musi Rawas Utara selaku DOB yang memiliki 7 kecamatan, apakah dapat berkembang, memberikan pelayanan yang merata dan masyarakat sudah tidak merasa “terpinggirkan”. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas selaku daerah induk, apakah tetap dapat berkinerja seperti biasa dan masyarakat tetap menerima pelayanan yang sama tanpa terlalu terpengaruh pasca pemekaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memahami bahwa permasalahan mendasar bagi pemekaran wilayah terutama pada dua daerah di Sumatera Selatan yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal adalah optimalisasi sektor unggulan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, optimalisasi PAD yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, dan tujuan utama dari pemekaran daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui judul penelitian “**Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Konteks Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara)**”, peneliti ingin menggali dan menganalisis dampak pemekaran wilayah pada Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal setelah dua

tahun pemekaran melalui parameter pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan masalah penelitian sebagaimana dijelaskan diatas adalah:

1. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi yang dialami daerah induk dan Daerah Otonomi Baru (DOB)?
2. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja keuangan daerah yang dialami daerah induk dan DOB?
3. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat yang dialami daerah induk dan DOB?
4. Bagaimana dampak positif dan negatif pasca pemekaran pada daerah induk dan DOB?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi yang dialami daerah induk dan DOB pasca pemekaran wilayah.
2. Memahami dan menganalisis dampak kinerja keuangan daerah yang dialami daerah induk dan DOB pasca pemekaran wilayah.
3. Memahami dan menganalisis dampak kesejahteraan masyarakat yang dialami daerah induk dan DOB pasca pemekaran wilayah.
4. Memahami dan menganalisis dampak positif dan negatif pasca pemekaran pada daerah induk dan DOB.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan referensi pemikiran dalam ilmu administrasi publik khususnya dalam hal dampak pemekaran daerah

pada daerah induk dan DOB menggunakan teori evaluasi dampak kebijakan dari Finsterbusch dan Motz (1980) dan Langbein (1980).

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan maupun rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan pemerintah daerah lainnya yang telah mengajukan usulan pemekaran daerah dengan optimalisasi sektor unggulan daerah, optimalisasi PAD melalui kebijakan yang tepat dan implementasi berkelanjutan, serta peningkatan bidang kesehatan dan pendidikan dengan fasilitas dan SDM yang mumpuni.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Adi, Priyo Hari. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. Simposium Nasional Akuntansi.
- Amadi, A. S. M., Hasan, S., Rifanto, N. A., Wildan, M., Afifah, N. Q., & Nisak, N. M. (2023). Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta yang Signifikan. *Educatio*, 18(1), 161–171. <https://doi.org/10.29408/edc.v18i1.14798>
- Anggreni, L., SETYOWATI, S. E., & NURKOLIS. (2024). DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPPK GURU DI KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(4), 1060–1066.
- Ayupijaya, M. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan di Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(3), 151–168. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v2i3.212>
- Aziza, T. N., & Srimarchea, D. W. (2023). Penanganan Daerah Tertinggal Di Indonesia. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 7(1), 1584–1600. <https://doi.org/10.37250/khazanah.v7i1.185>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2011). LHP atas LKP Kabupaten Musi Rawas TA 2010. Palembang: BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- \_\_\_\_\_. (2024). LHP atas LKP Kabupaten Musi Rawas TA 2023. Palembang: BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- \_\_\_\_\_. (2015). LHP atas LKP Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2014. Palembang: BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- \_\_\_\_\_. (2024). LHP atas LKP Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2023. Palembang: BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas 2023. Musi Rawas: BPS Kabupaten Musi Rawas.
- \_\_\_\_\_. (2012). Musi Rawas Dalam Angka 2012. Musi Rawas: BPS Kabupaten Musi Rawas.
- \_\_\_\_\_. (2024). Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2024. Musi Rawas: BPS Kabupaten Musi Rawas.
- \_\_\_\_\_. (2015). PDRB Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha 2010-2014. Musi Rawas: BPS Kabupaten Musi Rawas.
- \_\_\_\_\_. (2018). PDRB Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha 2013-2017. Musi Rawas: BPS Kabupaten Musi Rawas.
- \_\_\_\_\_. (2023). PDRB Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan



- Usaha 2018-2022. Musi Rawas: BPS Kabupaten Musi Rawas.
- \_\_\_\_\_. (2024). PDRB Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. Musi Rawas: BPS Kabupaten Musi Rawas.
- \_\_\_\_\_. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara 2022. Musi Rawas Utara: BPS Kabupaten Musi Rawas Utara.
- \_\_\_\_\_. (2024). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara 2023. Musi Rawas Utara: BPS Kabupaten Musi Rawas Utara.
- \_\_\_\_\_. (2015). Musi Rawas Utara Dalam Angka 2015. Musi Rawas Utara: BPS Kabupaten Musi Rawas Utara.
- \_\_\_\_\_. (2024). Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka 2024. Musi Rawas Utara: BPS Kabupaten Musi Rawas Utara.
- \_\_\_\_\_. (2016). PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut Lapangan Usaha 2011-2015. Musi Rawas Utara: BPS Kabupaten Musi Rawas Utara.
- \_\_\_\_\_. (2021). PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut Lapangan Usaha 2016-2020. Musi Rawas Utara: BPS Kabupaten Musi Rawas Utara.
- \_\_\_\_\_. (2024). PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. Musi Rawas Utara: BPS Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahl, R. W. (2002). *ScholarWorks @ Georgia State University Pillars of Fiscal Decentralization*. 19(2), 253–277.
- Biantoro, D., & Jasmina, T. (2021). Hubungan Antara Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan dengan Capaian Pembelajaran Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6, 198–214.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1999). *Fiscal Decentralization in Developing Countries* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511559815/type/book>
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2001). *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah: Dedy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin*. Gramedia Pustaka Utama.
- Canaldhy, R. S., Wijaya, B. A., & Hairi, M. I. A. (2019). Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.651>
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and development : Policy implementation in developing countries*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:127070138>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research*

*Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.*

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). *Handbook of qualitative research* (2nd ed). Sage Publications.
- Edistian, A. A. (2020). *Pengaruh Sektor Ekonomi Unggulan (Pertanian Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan dan Jasa Lainnya) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006 – 2018*. 1–150.
- Finsterbusch, K., & Motz, A. B. (1980). *Social research for policy decisions*. Wadsworth Publ.
- Harahap, E. H. (2019). *PENDEKATAN QSPM SEBAGAI DASAR PERUMUSAN STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN*. 1(September), 1–23. <https://doi.org/10.31933/JIMT>
- Hartariningsih, N. (2016). PEMERIKSAAN PAJAK. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 18(45). <https://doi.org/10.51921/kh0zhh09>
- Huda, A. Z., & Handoyo, S. E. (2023). PENGARUH IMPLIKASI KERJA PASCA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA PEGAWAI DIMODERASI OLEH TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 YANG BERDAMPAK PADA KEPUASAN PEGAWAI PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK. *CAKRAWALA*, 6, 1408–1419. <https://doi.org/10.35762/ej.2566005>
- Iskatrinah, I., & Supriyo, D. A. S. A. (2021). Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota. *Wijayakusuma Law Review*. <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.175>
- Jenzie, L., & Seddon, J. (1999). *Decentralization Briefing notes World Bank*. 2–6.
- Kusmila, Z., Kusmila, Z., Mukhzarudfa, H., Mukhzarudfa, H., Yudi, Y., & Yudi, Y. (2018). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jambi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah*. <https://www.semanticscholar.org/paper/4ec80e5ded5df94dfb969e8a8c26e9651eb2b50f>
- Langbein, L. I. (1980). Discovering whether programs work: a guide to statistical methods for program evaluation. In *The Goodyear Public Policy Analysis and Management Series*. Goodyear Publ.
- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49(1), 1–21. <https://doi.org/10.1086/452488>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Maulana, A., & Maulana, A. (2019). FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN NEGARA. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*. <https://doi.org/10.22219/jep.v17i1.8686>
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum otonomi daerah*. Mitra Wacana Penerbit.

- Nofiyanti, F. (2024). *DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA*. repository.unja.ac.id. <https://repository.unja.ac.id/62976/>
- Novita, Y., Wafiratulaela, W., Wicaksono, P. N., Mustofa, M. T. L., Sari, W. N., & Inawati, Y. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Sektor Ekonomi Melalui Finalisasi Kebijakan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 2371–2381. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2848>
- Nurmalasari, N., Ismatullah, I., & Darsawati, E. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pad. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 108–116. <https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1281>
- Pasaribu, S. (2016). Factors Affecting Circular Economy Promotion in Indonesia: The Revival of Agribusiness Partnership. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 24(2), 135. <https://doi.org/10.21082/fae.v24n2.2006.135-144>
- Pebriana, O. (2022). Analisis Muatan Berlebih (Overload) Dan Pengaruhnya Terhadap Umur Perkerasan Jalan ( Studi Kasus Jalan Raya Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Km 24+000 – Km 26+000). *Jurnal Media Teknologi*, 7(2), 95–108. <https://doi.org/10.25157/jmt.v7i2.2637>
- Prayoga, D. Y., Herman, H., & Farida, I. (2023). Prioritas Pemeliharaan Jalan Kabupaten Berdasarkan Ketersediaan Alokasi Anggaran. *Jurnal Konstruksi*, 21(2), 281–288. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.21-2.1550>
- Quesnay, F. (1968). *The Eeconomical Table (Tableau économique)*. Bergman Publishers.
- Ribot, J. (2004). *Waiting for democracy: The politics of choice in natural resource decentralization*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:153285680>
- Ridzki, I., Duanaputri, R., Maulana, E. R., & Wardani, A. L. (2021). Analisis pengaruh penambahan gardu induk Guluk-Guluk terhadap aliran daya dan profil tegangan pada sub sistem Krian Gresik. *JURNAL ELTEK*, 19(2), 55. <https://doi.org/10.33795/eltek.v19i2.316>
- Rifah, A. N., Alif, M., & Harahap, N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(2), 70–74. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v14i2.3421>
- Risanji, M. A., & Raflis. (2018). 1268-Article Text-2452-1-10-20190219. *Jurusan Teknik Sipil, Universitas Trisakti*, 98–102.
- Rorong, I. (2018). *ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN-KOTA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROPINSI SULAWESI UTARA (Study di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon)*.
- Rotty, S. J. L. (2016). Komparasi Kinerja Layanan Kesehatan pada Puskesmas Rawat Inap dengan Rawat Jalan di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*, 311(2), 311–322. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13014>

- Runiawati, N. (2017). Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13553>
- Rustendi, T.-. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian keuangan Daerah Pasca Pemekaran Wilayah. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.37058/jak.v1i1.1889>
- Safitri, W., Safitri, W., Yunitasari, D., Yunitasari, D., Yunitasari, D., Komariyah, S., & Komariyah, S. (2020). Pengaruh Pemekaran Wilayah... Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomian Daerah (Studi Kasus Tujuh Provinsi Hasil Pemekaran Wilayah Di Indonesia). <https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i1.12950>
- Sari, A. I. C., Zakiah Fithah A'ini, & Martinus Tukiran. (2022). Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 127–136.
- Sidik, M. (2002). SEBAGAI PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL ( Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia ). *Seminar "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia."*
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: the territorial dimension of the state*. Allen & Unwin.
- Smoke, P. (2003). Decentralisation in Africa: goals, dimensions, myths and challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7–16. <https://doi.org/10.1002/pad.255>
- Sukamto. (2018). Penentu Sektor Unggulan dalam Pembangunan. *Prosiding Semateknos*, 102.
- Syamsi, I. (1986). *Pokok-pokok kebijaksanaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan regional* (Edisi 1). Rajawali.
- Weiss, R. S. (1995). *Learning from Strangers: The Art and Method of Qualitative Interview Studies*. Free Press.
- Whitaker, W. H., & Federico, R. C. (1997). *Social welfare in today's world* (2nd ed). McGraw-Hill.
- Wignosubroto, S. (2005). *Pasang surut otonomi daerah: sketsa perjalanan 100 tahun* (Cet. 1). Institute for Local Development : Yayasan Tifa.
- Wong, J. D. (2004). The fiscal impact of economic growth and development on local government revenue capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 16(3), 413–423. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-16-03-2004-B006>
- Yin, R. K. (2016). Qualitative research from start to finish. In *Research methods* (Second edi). The Guilford Press. <http://files/502/Yin - 2016 - Qualitative research from start to finish.pdf>

### **Peraturan Perundangan**

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.*

### **Informan**

Andi. (2024). Wawancara kualitatif. 3 Desember 2024, Musi Rawas.

Anggun. (2024). Wawancara kualitatif. 2 Desember 2024, Musi Rawas Utara.

Ari. (2024). Wawancara kualitatif. 19 Desember 2024, Musi Rawas.

Bambang. (2024). Wawancara kualitatif. 3 Desember 2024, Musi Rawas.

Dayat. (2024). Wawancara kualitatif. 21 November 2024, Musi Rawas Utara.

Firdiansyah. (2024). Wawancara kualitatif. 16 Desember 2024, Palembang.

Hasanah, Uswatun. (2024). Wawancara kualitatif. 20 November 2024, Musi Rawas Utara.

Heri. (2024). Wawancara kualitatif. 20 November 2024, Musi Rawas Utara.

Juliaman. (2024). Wawancara kualitatif. 22 November 2024, Musi Rawas.

Mirwan. (2024). Wawancara kualitatif. 9 Desember 2024, Musi Rawas Utara.

Nasrullah. (2024). Wawancara kualitatif. 22 November 2024, Musi Rawas.

Ranti. (2024). Wawancara kualitatif. 6 Desember 2024, Musi Rawas Utara.

Sasuka. (2024). Wawancara kualitatif. 3 Desember 2024, Musi Rawas Utara.

Selvi. (2024). Wawancara kualitatif. 11 Desember 2024, Musi Rawas.

Sulastri, Sri. (2024). Wawancara kualitatif. 28 November 2024, Palembang.

Supiyon. (2024). Wawancara kualitatif. 19 November 2024, Musi Rawas.

Syawalludin. (2024). Wawancara kualitatif. 25 November 2024, Musi Rawas.

Topo. (2024). Wawancara kualitatif. 19 Desember 2024, Musi Rawas Utara.